

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Harga Komoditas Triwulan II (April - Juni)

1. Komoditas Stabil

Komoditas-komoditas berikut mengalami harga tetap (tidak berubah) selama tiga bulan berturut-turut:

- Beras Premium, Beras Medium, Beras SPHP: stabil di Rp15.000, Rp13.000, dan Rp12.500.
- Kedelai Biji Kering (Impor): stabil di Rp11.000.
- Daging Sapi Murni, Daging Ayam Ras, Gula Konsumsi, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Tepung Terigu (Curah), Tepung Terigu Kemasan: tidak mengalami fluktuasi.

Catatan: Komoditas ini memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan inflasi.

2. Komoditas Mengalami Penurunan Harga

Beberapa komoditas menunjukkan tren penurunan harga, yaitu:

- Cabai Merah Keriting: dari Rp67.143 (April) ke Rp36.071 (Juni). Rata-rata Rp47.821.
- Cabai Merah Besar: dari Rp67.143 → Rp36.071.
- Cabai Rawit Merah: dari Rp68.571 → Rp41.786.
- Ikan Kembung: dari Rp49.429 → Rp36.071.
- Ikan Tongkol: dari Rp31.143 → Rp30.036.

Interpretasi: Penurunan ini bisa disebabkan oleh musim panen, pasokan meningkat, atau perbaikan distribusi.

3. Komoditas Mengalami Kenaikan Harga

- Bawang Putih Bonggol: naik tipis dari Rp40.000 → Rp40.429 (Mei) sebelum turun jadi Rp36.071 (Juni).
- Minyak Kita: sedikit naik dari Rp17.000 ke Rp17.964.
- Ikan Kembung dan Ikan Tongkol mengalami fluktuasi meskipun cenderung menurun.

4. Komoditas Volatil (Fluktuasi Tinggi)

Komoditas dengan perbedaan harga maksimum dan minimum yang mencolok:

Komoditas	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Selisih
Cabai Rawit Merah	68.571	35.000	33.571
Cabai Merah Keriting	67.143	36.071	31.072

Cabai Merah Besar	67.143	36.071	31.072
Ikan Kembung	51.500	36.071	15.429

Implikasi: Komoditas hortikultura dan perikanan memiliki tingkat volatilitas tinggi, sehingga perlu intervensi distribusi, sistem penyimpanan (cold storage), dan kebijakan stabilisasi pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

- Banyak daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan komoditas pangan strategis sendiri.
 - Contoh: Beras, cabai, bawang, dan daging masih harus dipasok dari provinsi lain atau pusat produksi nasional.
 - Akibatnya, fluktuasi harga di daerah asal langsung berdampak pada harga lokal.
-

2. Distribusi dan Aksesibilitas yang Lemah

- Infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik di beberapa daerah masih terbatas.
 - Biaya distribusi tinggi menyebabkan harga naik sebelum sampai ke konsumen akhir.
 - Minimnya gudang penyimpanan (cold storage) mempercepat kerusakan bahan pangan.
-

3. Fluktuasi Musiman dan Iklim

- Komoditas hortikultura (cabai, bawang, sayur) sangat bergantung pada musim dan cuaca.
- Saat musim panen, harga jatuh. Saat gagal panen atau musim hujan, harga melonjak.
- Tidak semua daerah memiliki early warning system atau skema perlindungan harga.

4. Minimnya Data dan Informasi Harga yang Akurat

- Banyak pemerintah daerah tidak memiliki sistem informasi harga yang real-time.
- Hal ini menyulitkan pengambilan keputusan cepat dalam penanganan inflasi.
- TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) tidak selalu dilengkapi dengan dashboard analitik.

5. Koordinasi Antar Instansi Belum Optimal

- TPID kadang berjalan sendiri tanpa koordinasi kuat dengan dinas teknis (pertanian, perdagangan, transportasi).
- Kegiatan sidak pasar, operasi pasar, dan bantuan distribusi kurang terintegrasi.

6. Keterbatasan Anggaran Daerah

- Anggaran penanganan inflasi daerah seringkali terbatas dan tidak fleksibel.
- Program strategis seperti bantuan transportasi pangan, subsidi pupuk, atau buffer stock tidak bisa dilakukan maksimal.

7. Perilaku Konsumen dan Pedagang

- Panic buying, spekulasi pedagang, dan pola konsumsi musiman (seperti saat Lebaran/Nataru) memicu lonjakan harga.
- Stok ditahan pedagang menunggu harga tinggi (praktek penimbunan).

8. Minimnya Peran Teknologi dan Inovasi

- Belum banyak daerah yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi, mencegah, dan

merespons inflasi.

- Pasar daring, e-commerce, atau integrasi rantai pasok digital belum dioptimalkan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. TPID Kabupaten Pesisir Barat secara rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok dan penting di 6 Pasar Tradisional dan melaporkan setiap hari kepada Itjen Kemendagri;
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap minggunya, kemudian dilanjutkan dengan Rapat TPID untuk membahas persoalan yang ada dan mengambil langkah kebijakan pengendalian inflasi;
3. Mempublikasi data harga bahan pokok setiap minggu di Website Resmi Kabupaten Pesisir Barat agar dapat diketahui masyarakat dan mencegah panicbuying (belanja berlebihan).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Koordinasi TPID belum optimal, terutama dalam pengambilan keputusan cepat lintas sektor.
2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah belum diatasi secara struktural.
3. Anggaran untuk pengendalian inflasi terbatas dan belum terintegrasi antar OPD.
4. Minimnya intervensi di hulu, seperti program peningkatan produksi dan dukungan ke petani.
5. Penggunaan teknologi digital dan data analytics masih rendah, sehingga reaksi terhadap lonjakan harga lambat.
6. Program hanya bersifat reaktif (misalnya: pasar murah saat harga naik), belum berbasis sistem peringatan dini.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Pesisir Barat

Berikut adalah rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di tingkat daerah:

1. Penguatan Produksi Lokal Komoditas Volatil

Daerah perlu mendorong pengembangan hortikultura (cabai, bawang, sayuran) dan sektor perikanan sebagai sumber pasokan utama. Insentif bagi petani dan nelayan lokal serta bantuan sarana produksi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pasokan.

2. Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Kerja sama pasokan antar daerah harus diperluas dan diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan sentra produksi. Tujuannya adalah menjamin pasokan tetap dan harga yang stabil melalui distribusi langsung.

3. Digitalisasi Sistem Pemantauan dan Respon Inflasi

Pemda didorong untuk menerapkan dashboard harga real-time dan sistem peringatan dini (Early Warning System) berbasis data. Hal ini memungkinkan pengambilan kebijakan cepat dan tepat saat gejolak harga terjadi.

4. Anggaran Khusus dan Terintegrasi

Diperlukan pengalokasian anggaran khusus untuk kegiatan pengendalian inflasi yang terintegrasi antar OPD. Penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), hibah pangan, atau subsidi transportasi dapat digunakan secara strategis.

5. Perluasan Pasar Murah Reguler dan Mobile

Pasar murah sebaiknya dilaksanakan secara rutin (bulanan) dan menjangkau desa-desa terpencil melalui layanan pasar keliling. Hal ini akan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

6. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pemda perlu membentuk Lumbung Pangan Daerah dan Desa yang aktif, dengan mekanisme rotasi stok. Cadangan ini akan menjadi bantalan saat terjadi lonjakan harga atau gangguan distribusi.

7. Pendidikan Konsumen dan Literasi Pasar

Edukasi kepada masyarakat penting untuk mencegah panic buying, meningkatkan konsumsi pangan alternatif, dan memahami fluktuasi harga. Transparansi harga di pasar tradisional juga perlu ditingkatkan dengan papan digital atau aplikasi lokal.